

Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Barat Periode 2000 – 2020

Santi Fitria Andriani*, Westi Riani

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*santifitriaa13@gmail.com, westiriani@gmail.com

Abstract. West Java is one of the provinces in Indonesia with the largest population and is the province that supports the capital city, where the gap between the new workforce and the existing employment continues to widen, especially in the early 2000s. The problem of unemployment is indeed very complex to discuss and is an important issue because it can be linked to several indicators. Unemployment can be a measure of the success of two sectors at once, namely the economic development sector and the human resource development sector. This study aims to determine how and how much influence the rate of economic growth, the regional minimum wage and the human development index on the level of unemployment in West Java Province for the period 2000 to 2020. The research method used is descriptive analysis verification. Secondary data sourced from BPS, processed with e-views application, and then carried out statistical and econometric testing. The results of the study show that economic growth, minimum wages and the human development index together have an influence on the unemployment rate in West Java Province for the period 2000 – 2020. The magnitude of the effect is indicated by the value of the coefficient of determination, which is 0.697256. Partially, economic growth has no significant effect of 0.5446 on TPT, the minimum wage has a negative effect of 0.0000 on TPT and the human development index has a positive effect of 0.0017 on TPT.

Keywords: *Unemployment, Economic Growth, Wages and Human Resource*

Abstrak. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan penduduk terbesar serta menjadi provinsi penyangga ibu kota, dimana kesenjangan (*gap*) angkatan kerja baru dibanding dengan lapangan kerja yang ada terus membesar khususnya pada awal dekade 2000an. Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator. Pengangguran dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dua sektor sekaligus yaitu sektor pembangunan ekonomi dan sektor pembangunan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan berapa besar pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat periode 2000 sampai dengan 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif verifikatif. Data sekunder yang bersumber dari BPS, diolah dengan aplikasi *e-views*, dan selanjutnya dilakukan pengujian secara statistik dan ekonometrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2000–2020. Besarnya pengaruh ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi yaitu 0.697256. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan sebesar 0.5446 terhadap TPT, upah minimum berpengaruh negatif sebesar 0.0000 terhadap TPT dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif sebesar 0.0017 terhadap TPT.

Kata Kunci: *Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah dan SDM.*

A. Pendahuluan

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu amanat dari konstitusi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa : "... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...". (Pembukaan UUD 1945 Alinea IV). Terkait hal tersebut, dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan di segala sektor menjadi suatu keniscayaan termasuk pembangunan ekonomi yang ditopang oleh pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Indonesia.

Pembangunan ekonomi merupakan kemampuan ekonomi nasional dimana keadaan ekonominya mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang cukup lama untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP-nya hingga mencapai angka 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun. Pengertian ini sangat bersifat ekonomis. Namun demikian, pembangunan ekonomi bersifat multidimesi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya salah satu aspek (ekonomi) saja. Pembangunan ekonomi itu dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu Negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya (Arsyad, 2015) Pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per kapita, namun harus pula melihat bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk dan mengetahui siapa yang mendapat manfaat dari pembangunan tersebut seperti terbukanya lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran sebagai bentuk pembangunan SDM masyarakat Indonesia. Menurut Lincoln Arsyad (2015, keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu yang pertama, berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sustenance). kedua, meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia. Ketiga, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia (Arsyad, 2015).

Pada konteks negara maju, tingkat penganggurannya biasanya berkisar antara 2–3 persen, di mana hal ini disebut juga dengan tingkat pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran alamiah adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tidak mungkin dihilangkan. Artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 2-3 persen itu berarti perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (full employment). (Sadono, 2016). Dalam hal ini, data terakhir tercatat pada tahun 2015, jumlah penduduk di Indonesia sebesar 238.518.000 jiwa dan pada akhir 2020 meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa (BPS, 2015). Dari sektor pertumbuhan ekonomi, triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2020 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 2,97 persen (y-on-y), melambat dibanding capaian triwulan I-2020 yang sebesar 5,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan 4 tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,67 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,74 persen. (BPS, 2015). Pada tingkat provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan penduduk terbesar serta menjadi provinsi penyangga ibu kota, kesenjangan (gap) angkatan kerja baru dibanding dengan lapangan kerja yang ada terus membesar khususnya pada awal dekade 2000an. Kondisi tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan sejak masa krisis ekonomi di tahun 1997 atau akhir abad 20. Memasuki abad 21, pertumbuhan indeks pembangunan SDM di Jawa Barat pun belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja di Provinsi Jawa Barat yang rendah terus makin dalam.

Terkait uraian di atas, pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat ditunjang dengan kualitas SDM yang ada pada masyarakat itu sendiri untuk memiliki penghasilan atau pendapatan dari kegiatan ekonomi atau suatu pekerjaan pada khususnya. Oleh karena itu, jika pada suatu masyarakat masih banyak SDM yang tidak memiliki penghasilan karena tidak memiliki pekerjaan tentu dapat menghambat proses pembangunan ekonomi secara nasional. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa peningkatan pembangunan nasional dapat terlihat meningkat atau berkembang jika dapat menekan angka pengangguran di negara tersebut. Namun, Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang terus menerus membengkak yang

artinya tingkat pembangunan nasional belum menunjukkan taraf yang optimal.

Pada tingkat provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan penduduk terbesar serta menjadi provinsi penyangga ibu kota, kesenjangan (gap) angkatan kerja baru dibanding dengan lapangan kerja yang ada terus membesar khususnya pada awal dekade 2000an. Kondisi tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan sejak masa krisis ekonomi di tahun 1997 atau akhir abad 20. Memasuki abad 21, pertumbuhan indeks pembangunan SDM di Jawa Barat pun belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja di Provinsi Jawa Barat yang rendah terus makin dalam. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per bulan Mei 2020.

Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator. Dalam hal ini, indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan, tingkat Upah Minimum, serta besaran upah yang berlaku. Apabila di suatu negara pertumbuhannya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran pula. Sedangkan tingkat Upah Minimum yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran (Sadono, 2016).

Selain pertumbuhan ekonomi dan upah minimum, faktor lain yang menyebabkan tingkat pengangguran adalah Indeks pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan yang berkembang pada tahun 90-an yaitu paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (human centered development).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi (LPE), upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di provinsi Jawa Barat periode tahun 2000 – 2020.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi (LPE), upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di provinsi Jawa Barat periode tahun 2000 – 2020

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif-analisis dan analisis verivikatif. Metode deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan fenomena tingkat pengangguran di provinsi Jawa Barat periode tahun 2000 – 2020 serta kondisi variabel mempengaruhinya seperti Pembangunan Ekonomi (LPE), Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia. (Sugiyono, 2018).

Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di provinsi Jawa Barat periode tahun 2000 – 2020, digunakan model persamaan regresi berikut :

$$TP = a + b LPE + c UMR + d IPM$$

Keterangan :

TP = Tingkat Pengangguran

PE = Pertumbuhan Ekonomi/LPE

UM = Upah Minimum (UMR)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

a = koefisien regresi

b = koefisien dari Pertumbuhan ekonomi (output)

c = koefisien dari upah minimum

d = koefisien dari Indeks Pembangunan Manusia

Metode analisis Model regresi linear berganda diperoleh dengan melakukan estimasi terhadap parameter-parameternya menggunakan metode. Analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) yang diolah dengan program Eviews 7.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data time series meliputi periode waktu 2000-2020 dengan jumlah observasi data 20 tahun. Adapun berikut hasil; estimasi model :

Tabel 1. Estimasi Model Pengaruh LPE, UMR, dan IPM terhadap TPT di Provinsi Jawa Barat 2000-2020

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.02626	8.525740	1.879750	0.0774
LOG (UMR)	-3.258638	0.524143	-6.217080	0.0000
LPE	0.189143	0.305928	0.618259	0.5446
IPM	0.543481	0.145640	3.731676	0.0017
<i>R-squared</i>	0.697256	<i>Durbin-Watson stat</i>		1.568254
<i>F-statistic</i>	13.05104			
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000114			

Sumber : Data olahan Eviews, 2021.

Tabel di atas mengenai estimasi model penelitian, dapat dikembangkan dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$TPT = 16.02626 - 3.258638 \text{ LOG(UMR)} + 0.189143 \text{ (LPE)} + 0.543481 \text{ (IPM)} + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan :

1. Nilai koefisien konstanta sebesar 16.02626 satuan menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi (LPE), UMR dan IPM bersifat konstan, maka Tingkat Pengangguran (TPT) akan bernilai positif atau mengalami peningkatan sebesar 16.02626 satuan.
2. Pada variabel Upah Minimum Regional (UMR), menunjukkan jika terjadi peningkatan sebesar satu persen maka akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 3.25838.
3. Pada variabel pertumbuhan ekonomi (LPE), menunjukkan jika terjadi peningkatan sebesar satu persen maka akan meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 0.189143.
4. Pada variabel IPM, menunjukkan jika terjadi peningkatan sebesar satu persen maka akan meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 0.543481.

Kemudian untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel pada tingkat kepercayaan tertentu. Adapun hasil pengujian uji t-statistik sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji t-Statistik

Variabel	Nilai Koefesien	t-bitung	Prob.	Keterangan
Konstanta	16.02626	1.879750	0.0774	
LPE	0.189143	0.618239	0.5446	Berpengaruh negatif pada tingkat α 0.05
LOG (UMR)	-3.258638	-6.217090	0.0000	Tidak berpengaruh pada tingkat α 0.05
IPM	0.543481	3.731676	0.0017	Berpengaruh positif pada tingkat α 0.05

Berdasarkan tabel Hasil Uji Statistik di atas, dengan tingkat α 0.05 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada variabel pertumbuhan ekonomi (LPE) menunjukkan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan nilai probabilitas $0.5446 > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel UMR tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) di Provinsi Jawa Barat artinya kenaikan LPE tidak berpengaruh terhadap peningkatan TPT
2. Pada variabel Upah Minimum Regional (UMR) menunjukkan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel UMR berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran (Y) di Provinsi Jawa Barat atau peningkatan UMR disertai dengan penurunan TPT.
3. Pada variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dengan nilai probabilitas $0.0017 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel IPM berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y) di Provinsi Jawa Barat atau peningkatan IPM dapat meningkatkan TPT.

Kemudian Hasil pengujian f-statistik pada penelitian ini yaitu dengan membandingkan antara probabilitas f-statistik dengan nilai probabilitas (0.05). Hasil pengujian didapat nilai probabilitas f-statistik untuk variabel bebas sebesar (0.000000) lebih kecil dibandingkan dengan p-value (0.05). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya variabel bebas yaitu UMR, LPE dan IPM secara bersama-sama memiliki pengaruh pada tingkat signifikansi 0.05 terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa LPE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan signifikansi > 0.05 adanya hubungan positif antara LPE terhadap tingkat pengangguran yang ditandai oleh fenomena yang terjadi di Provinsi Jawa Barat periode 2000-2020. Dalam hal ini, hasil penelitian Septina (2018) menyatakan bahwa meningkatnya pengangguran disebabkan meningkatnya angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Ketidaktepatan antara kebutuhan penyedia lapangan pekerjaan dengan pihak pendidikan yang bertugas menyiapkan keahlian para siswa juga dapat menjadi sebab meningkatnya pengangguran. Selain itu pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan pengangguran karena pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan banyak berdirinya perusahaan yang menggunakan teknologi untuk efisiensi profit, sehingga tenaga kerja tidak terserap secara optimal.

Kemudian variabel UMR memiliki tingkat signifikansi $0.0000 < 0.0005$ yang menunjukkan bahwa variabel UMR berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Adapun hubungan negatif antara UMR terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan teori Mankiw (2000), yang berpendapat bahwa alasan adanya pengangguran disebabkan oleh kekakuan upah atau gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Upah yang rendah mendorong perusahaan lebih banyak menggunakan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Keynes menulis dalam "The General Theory" bahwa kenaikan dalam kesempatan kerja hanya bisa terjadi bila tingkat upah turun.

Peningkatan jumlah tenaga kerja yang diikuti oleh peningkatan upah minimum di Jawa Barat disebabkan karena banyaknya industri padat karya terutama di sektor formal. Daerah yang memiliki basis industri yang tinggi relatif memiliki tingkat upah yang relatif tinggi seperti

daerah Karawang, Bandung, Depok, Bekasi, Purwakarta. Tumbuhnya industri padat karya relatif padat perusahaan tekstil seperti garmen yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga hal ini akan di ikuti pula oleh peningkatan tenaga kerja, Adapun faktor lain dimana tuntutan serikat pekerja di Jawa Barat menginginkan besaran upah yang tinggi sehingga pemerintah Jawa Barat melindungi kepentingan pencari kerja, dengan meningkatkan besaran upah yang tinggi.

Variabel IPM memiliki tingkat signifikansi $0.0013 > 0.05$ yang berarti bahwa variabel IPM berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). IPM yang menunjukkan indeks komposit dari kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli mencerminkan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya IPM bisa menunjukkan terjadinya petunjuk bagi sektor usaha untuk meningkatkan kapasitas output dan menambah permintaan tenaga kerja, sehingga menyebabkan turunnya tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Firdhania dan Fivien (2017) menyatakan bahwa IPM memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran. Artinya Indeks Pembangunan manusia di sebuah wilayah yang meningkat akan mampu mengurangi jumlah pengangguran. Dengan kata lain, IPM mengalami peningkatan maka dapat diartikan pembangunan otonomi daerah menjadi lebih baik. Peningkatan IPM yang ada dapat disebabkan oleh faktor pendidikan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Upah Minimum Regional (UMR) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2000-2020, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) memiliki pengaruh tidak signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap Tingkat pengangguran terbuka (TPT). Hal ini disebabkan karena tumbuhnya industri kecil dan sedang yang berorientasi padat modal.
2. Upah Minimum Regional (UMR) memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap Tingkat pengangguran terbuka (TPT). Adanya tuntutan serikat kerja atas tingginya upah dan tumbuhnya industri hilir terutama tekstil dan garmen menjadi penyebab UMR memiliki hubungan negatif terhadap TPT.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap Tingkat pengangguran terbuka (TPT). Meningkatnya IPM di Provinsi Jawa Barat menyebabkan terjadinya peningkatan daya beli masyarakat

Acknowledge

Terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan baik secara material maupun immaterial; perhatian, semangat, bimbingan, saran serta memberikan doa untuk penulis dengan rasa hormat kepada Kedua orang tua, adikku, dan keluarga besarku. Ria Haryatiningsih, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I, Aan Julia, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing II dan Ade Yunita Mafruhah, SE., M.Soc., Sc selaku dosen wali. Dr. Ima Amaliah, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan dan seluruh dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan; Prof. Dr. Atih Rohaeti Dariah, S.E., M.Si, Dr. Asnita Frida Sebayang, S.E, M.Si, Dr. Dewi Rahmi, S.E., M.Si, Dr. Nurfamiyati, S.E, M.Si, Yuhka Sunda, S.E., M.Si, dan Meidy Haviz, S.E., M.Si. Serta seluruh teman-teman peneliti.

Daftar Pustaka

- [1] Aditya, D. P. (2016). Pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 14 Nomor (1), 8 - 21.
- [2] Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- [3] Hasyim, A. (2017). *Ekonomi Makro*. Depok: Penerbit Kencana.
- [4] Muslim, M. R. (2014). Pengangguran Terbuka dan Determinannya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Volume 15, Nomor 2, 171 - 181.

- [5] Sadono, S. (2016). Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Press.
- [6] Simangunsong, C. K. (2018). Inequality and Economic Growth in Indonesia ini the 2000's. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 7 Nomor 2, 201 - 212.
- [7] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [8] Suparmoko. (2017). *Pokok-Pokok Ekonomika*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- [9] Todaro, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- [10] UNDP. (2014). *Human Development Report*. New York: United Nations Development Programe.
- [11] Zurisdah. (2016). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, UIN Maulana Hasanuddin, 96 - 104.
- [12] Setiawan, M. B. (2013). Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Economia* Volume 9 Number (1), 1 - 12.
- [13] Simangunsong, C. K. (2018). Inequality and Economic Growth in Indonesia ini the 2000's. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 7 Nomor 2, 201 – 212
- [14] Sonny, S. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [15] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [16] Sunarni. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Se-Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Lampung, 1 - 22.
- [17] Suparmoko. (2017). *Pokok-Pokok Ekonomika*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- [18] Todaro, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- [19] UNDP. (2014). *Human Development Report*. New York: United Nations Development Programe.
- [20] Widodo, A. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Manusia*, Volume 5 Nomor 2, 144.
- [21] Yustia, T. V. (2016). Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Depok: Huta Media.
- [22] Zaeni, A. (2007). *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [23] Zurisdah. (2016). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, UIN Maulana Hasanuddin, 96 - 104.